

BAB III

KERJASAMA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DI BIDANG PERTAHANAN

A. Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang pertahanan. Hal ini penting untuk dibahas karena diperlukan untuk mengetahui apa saja kerjasama di bidang pertahanan yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan. Serta alasan kebijakan Indonesia memilih untuk bekerja sama dengan Korea Selatan dalam pengadaan kapal selam DSME 209/1400. Hal ini penting untuk dibahas supaya dapat mengetahui lebih dalam mengenai detail kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembelian dan pengembangan kapal selam DSME 209/1400.

B. Kerjasama Bilateral Indonesia – Korea Selatan

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia sudah berjalan selama lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara menandatangani persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler pada di bulan Mei 1966. Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembukaan kantor Konsulat Jendral Korea Selatan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1966 dan dilanjutkan dengan pembukaan Konsulat Jendral Indonesia di Seoul pada tanggal 1 Juni 1968. Sebagai langkah pertama dimulainya hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia, hubungan diplomatik pada tingkat konsuler

membuka banyak kesempatan bagi kedua negara untuk bekerjasama di berbagai bidang demi tercapainya kepentingan kedua negara. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin meningkatnya hubungan kedua negara ditingkatkan ke tingkat diplomatik penuh pada tanggal 18 September 1973 (Rahmah, 2013).

Dalam perkembangan berikutnya, hubungan bilateral kedua negara diberbagai bidang mengalami berbagai pasang surut. Sejak awal tahun 1980 Korea Selatan membina kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia walaupun ekonomi dunia menitikberatkan pada regionalisme dan mengarah pada pembentukan blok regional yang luas, Korea Selatan terus berusaha menghadapinya dengan keunikan politik dan ekonominya, termasuk permasalahan antar Korea (Korea Selatan – Korea Utara) yang sangat rumit. Dalam hal itu, bagi Korea Selatan, Indonesia menjadi negara terpenting di Kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya berdasarkan alasan ekonomi, namun juga berdasarkan alasan keamanan dan politik internasional (Rahmah, 2013).

Pada 4 Desember 2006 hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan ditingkatkan lagi dengan membuka kerjasama kemitraan strategis dengan penandatanganan *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korsel Roh Moo Hyun. Joint Declaration berisi tiga pilar kerjasama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, dan kerjasama sosial budaya (Kementrian Luar negeri Indonesia, 2015).

Selanjutnya Kunjungan Presiden Korea Selatan ke Indonesia, Lee Myung- bak pada tanggal 6-8 Maret 2009 juga berhasil membuat sejumlah perjanjian kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MOU)* di bidang pendidikan, riset dan teknologi, dan kesehatan; dan *Letter of*

Intent (LOI) di bidang pertahanan (Kementerian Luar negeri Indonesia, 2015).

Pada 11 Desember 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye dalam agenda kunjungan kenegaraan. Di pertemuan tersebut Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis antara keduanya (Kementerian Luar negeri Indonesia, 2015).

Kemitraan strategis Indonesia dengan Korea Selatan meliputi kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dengan Korea Selatan sepakat untuk (1) menghidupkan kembali *Joint Commission Meeting* (JCM) tingkat Menlu antara kedua negara dan pertemuan tersebut dijadwalkan pada awal tahun depan. Dengan adanya JCM ini, akan memudahkan kedua negara untuk memantau perkembangan kerjasama dan menindaklanjuti kesepakatan yang sudah disetujui pada tingkat pemimpin. (2) Menyepakati peningkatan industri pertahanan, diantaranya transfer pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembangunan kapal selam dan pesawat tempur. (3) Korea Selatan berkomitmen untuk ikut berperan serta dalam pembangunan Kesatuan Penjaga Pantai dan galangan kapal Indonesia. (4) Pemimpin kedua negara menandatangani Persetujuan Pembentukan Komite Bersama dalam bidang e-Government dan reformasi birokrasi. (5) Presiden Republik Indonesia mendukung upaya menciptakan stabilitas dan menjaga perdamaian di tingkat regional maupun global, termasuk Semenanjung Korea (Kementerian Luar negeri Indonesia, 2015).

Indonesia juga menyampaikan keinginannya agar Korea Selatan dapat membeli lebih banyak pesawat militer/sipil buatan Indonesia, diantaranya CN 235 serta meng-upgrade 12 CN 235 yang dimiliki Republic of Korea Aircraft (ROKAF) serta dalam pertemuan tersebut juga menyepakati untuk memperkuat kerjasama di bidang maritim baik dalam kerangka kerjasama bilateral maupun regional. Indonesia mengharapkan agar Indonesia dan Korea Selatan dapat

bekerjasama dalam mengimplementasikan lima pilar kerjasama maritim sebagaimana dimandatkan pada EAS Summit di Kuala Lumpur (KBRI Seoul, n.d.).

C. Kerjasama Pertahanan Indonesia – Korea Selatan

Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan pada pemenuhan alutsista angkatan laut dimulai sejak ditandatanganinya *Memorandum Of Understanding* pada “*Navy to Navy Talks*” antara TNI AL dan Angkatan Laut Korea yang ditandatangani pada bulan Desember 1996. Selain itu, Korea Selatan meningkatkan kerjasama dibidang jual-beli peralatan militer seperti yang tertuang dalam kontrak penjualan 8 unit CN-235 berdasarkan pada *Letter Of Agreement* yang ditandatangani oleh wakil dari kedua negara pada bulan April 1997 (Seung-Yoon, 2005).

Dalam laporan tahunan 1994-1995 disebutkan bahwa TNI-AL sedang memesan 1 buah “*Ocean Going Tug Boat*” atau Kapal Tunda Samudra yang tengah dibuat di galangan kapal Daewoo Pusan. Korea Selatan juga pernah memproses kendaraan militer (jeep dan truk), tank ringan, plant amunisi, kapal perang, angkatan laut, amunisi, alat-alat anti demonstrasi, dan parasut terjun payung untuk diekspor ke Indonesia sesuai dengan jumlah yang telah disepakati (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012).

Kerjasama pada bidang pertahanan yang pernah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan diantaranya adalah perjanjian pengaturan pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kemitraan Pertahanan Republik Korea Selatan tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk material dan jasa pertahanan (*Agreement Between the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the*

Republic of Korea Concerning Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defense Materiel and Services) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012).

Selain itu, ditandatangani juga Letter of Intent mengenai kerjasama khusus industri pertahanan antara Department Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Korea (*Letter of Intent for Specific Defense Industry Cooperation between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea*) pada tanggal 22 Desember 2000 di Jakarta (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia).

Selanjutnya hubungan Indonesia dan Korea Selatan ditingkatkan menjadi kemitraan strategis yang ditandai dengan penandatanganan Joint Declaration on Strategic Partnership oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun pada tanggal 4 Desember 2006 di Jakarta. Joint Declaration terdiri dari tiga pilar kerjasama, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi; kerjasama sosial budaya. (KBRI Seoul, n.d.). Selain itu, Kunjungan Presiden ROK, Lee Myung-bak pada tanggal 6-8 Maret 2009 menyepakati sebuah *Letter of Intent* (LOI) di bidang pertahanan (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012) yaitu pengembangan kerjasama proyek jet perang antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Republik Korea (*Letter of Intent on Co-development of a Fighter Jet Project between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Defense Acquisition Program Administration of the Republic of Korea*) (Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia).

Pada tanggal 15 Juli 2010 di Seoul, menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) mengenai kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X, yang

dilanjutkan dengan kontrak tentang *Technology Development Phase Program* pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pada tanggal 20 April 2011 di Daejeon. Berdasarkan peraturan Presiden tentang program pengembangan pesawat tempur IF-X dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap pengembangan teknologi, tahap pengembangan rekayasa serta manufaktur dan tahap produksi. Tahap pengembangan teknologi merupakan tahapan untuk membangun prasaratan operasional, identifikasi teknologi, dan desain konfigurasi Pesawat Tempur IF-X (Jalo, 2015).

Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan dipusatkan pada pengembangan Kapal Selam kelas Changbogo dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Kedua proyek ini menjadi fokus utama kerjasama strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kapal Selam kelas Changbogo memiliki beberapa teknologi mutakhir seperti *Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull penetrating Mast and Comfortable Accommodation*. Pembelian kapal selam Changbogo memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan TNI Angkatan Laut (Jalo, 2015).

D. Kerjasama Pembelian dan Pengembangan Kapal Selam DSME 209/1400

Kapal selam menjadi salah satu program prioritas modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Selain alutsista memiliki teknologi persenjataan yang tinggi, kapal selam memberikan efek deterrence (daya tangkal) terhadap negara lain yang berupaya memasuki perairan nasional (Meidiani, 2018). Dengan alokasi anggaran untuk pengadaan 3 unit kapal selam yang sangat besar terbagi dalam dua rencana strategis (Renstra) yaitu Renstra I tahun 2004-2009 sebesar

350 juta dolar Amerika Serikat dan Renstra II tahun 2010-2014 sebesar 730 juta dolar Amerika Serikat, Indonesia berkeinginan untuk menguasai teknologi kapal selam melalui industri dalam negeri (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014).

Pentingnya Indonesia memiliki kapal selam juga memiliki tujuan untuk menjaga wilayah laut Indonesia dalam negeri yang memiliki luas 93.000 km persegi termasuk selat, teluk, dan laut ditambah dengan area laut luar termasuk laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif /ZEE mencapai total lima juta km persegi (Rusman, 2018).

Satuan kapal selam nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap negara Indonesia sebagai *leadership role* di kawasan regional dan ikut serta dalam permasalahan global. Hal ini konsisten dengan paradigma TNI AL yaitu Menjadi Angkatan Laut Berkelas Dunia (*World Class Navy*) (Rizanny, 2017).

Pemerintah memilih Korea Selatan sebagai tempat pembelian kapal selam karena pertimbangan harga yang lebih murah dari negara lain. Untuk harga 3 kapal selam dari Korea Selatan sebesar USD 1 miliar, sedangkan dari negara lainnya harga per unit mencapai USD 450 juta- USD 500 juta.

Menurut Rahmat Lubis, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, pembelian tiga kapal selam dari Korsel seharga harganya USD 1 miliar. Dengan harga tersebut, tidak memungkinkan dapat dari membeli dari negara Eropa yang berharga sekitar USD 450 - USD 500 juta untuk satu kapal selam. Selain masalah harga, Korea Selatan juga merupakan mitra mumpuni dari segi kualitas, bahkan dalam pengadaan selalu cepat dalam pengiriman barang.

Menurut Rahmat Lubis, produsen kapal selam Korea Selatan dapat membagi ilmunya serta mau datang ke Indonesia untuk membimbing PT PAL Indonesia untuk membuat kapal selam sendiri. Secara kualitas, kapal selam dari Korea Selatan memiliki kecanggihan yang sama dengan

kapal selam sejenisnya. Kapal selam tersebut memiliki berat 1.600ton yang dilengkapi torpedo. Kecanggihannya diesel elektrifikasi relatif sama dengan yang lain harus senyap tahan lama, senjata harus standar dengan kapal (Julaikah, 2014).

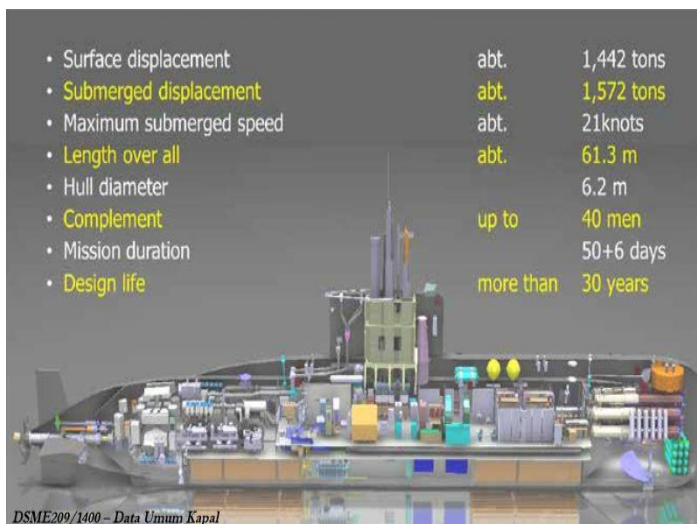
Kementerian pertahanan memilih kapal selam Chang Bogo karena merasa yakin telah memegang teknologi yang membuat kapal selam ini menjadi sangat senyap namun mematikan. Doktrin perang Indonesia perlu diperhatikan untuk menempatkan kapal selam ini pada proporsi yang sebenarnya. Doktrin perang Indonesia adalah bertahan dan tidak punya niat untuk melakukan penyerbuan/ *pre-emptive strike* ke luar wilayah Indonesia. Dengan doktrin tersebut, kapal selam Chang Bogo yang relatif kecil dianggap tepat untuk bermanuver di wilayah perairan Indonesia. Doktrin perang laut Indonesia juga tidak menempatkan kapal selam untuk bergerak sendiri dalam menyerang musuh. Kapal selam bergerak bersama kapal lain untuk saling melindungi (Saragih, 2012).



Gambar 3.1
Kapal Selam DSME 209/1400

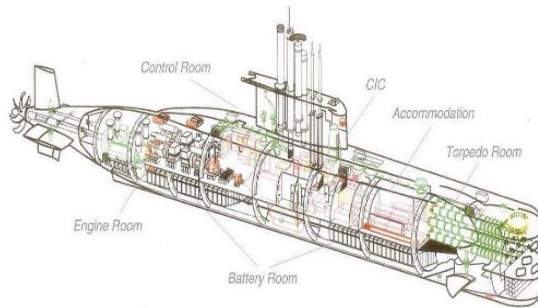
Tahun 2012, Indonesia dan Korea Selatan mulai merealisasikan pengembangan kapal selam sebagai proyek Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) yang dinamakan DSME209/1400 *Submarine* (Changbogo Class).

Penambahan alutsista kapal selam ini diharapkan dapat menjadi wadah kekuatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam pembuatan kapal selam. Mantan Wakil Menteri Pertahan Sjafrie Sjamsoedin, mengatakan bahwa alih teknologi (*Transfer of Technology*) pembuatan kapal selam sudah masuk dalam kontrak pembelian tiga kapal selam. Berdasarkan kontrak, ketiga kapal selam ini menghabiskan biaya sekitar USD 1,079.999 miliar yang diambil dari alokasi pengadaan alutsista tahun 2010-2014. Kepala Badan Sarana Pertahanan Mayor Jenderal, Ediwan Prabowo, mengatakan, untuk menjamin terlaksananya alih teknologi, pembuatan kapal selam ketiga akan dilakukan sepenuhnya di dalam negeri melalui PT. PAL (Meidiani, 2018).



Gambar 3.2
Data Umum Kapal Selam DSME 209/1400

CHANGBOGO Class Submarine



Gambar 3.3
Bagian-bagian Kapal Selam DSME 209/1400

Kapal selam kelas Chang Bogo milik Korea Selatan aslinya merupakan kapal selam Tipe 209/1200 yang diketahui telah menerima berbagai modifikasi kelas berat, sejak permulaan abad 21 diantaranya, termasuk penambahan panjang lambung kapal menjadi setara kapal selam tipe 209/1400 dan tipe 209/1500, kemampuan untuk meluncurkan rudal *sub-Harpoon*, penggunaan sistem AIP juga sistem akustik penangkal torpedo baru (*Torpedo Acoustic Counter Measures / TACM*) yang dikembangkan secara mandiri oleh Korea Selatan (Meidiani, 2018).

Kapal selam DSME209/1400 merupakan pesanan khusus dari *Korean Navy* untuk memperkuat skuadron kapal selam negara Korea Selatan yang mana sekarang ini baru terdiri dari beberapa kelas *Midget*, U209/1200 dan U214/1800. Proyek desain kapal selam berbobot 3000T ini sudah dimulai pada awal tahun 2015 dan rencana pembangunannya dimulai pada tahun 2016 (Jalo, 2015).

Untuk kapal selam pesanan Indonesia, meski merupakan turunan dari tipe U-209 buatan Jerman, TNI AL meminta spesifikasi yang tinggi terhadap kapal selam DSME209/1400. Diantaranya adalah, memiliki kesenyapan

yang tinggi, mampu menghindari deteksi, mampu menyelam hingga kedalaman 250 meter, pemutakhiran teknologi serta memiliki kecepatan yang mampu melaju hingga 21 knot ketika menyelam. Kapal selam DSME209/1400 harus mampu beroperasi terus menerus selama lebih kurang 50 hari. Selama proses pembangunan kapal selam di Korea, TNI AL telah mengirimkan tujuh orang personel yang masing-masing memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus tentang kapal selam jenis 209 secara profesional (Jalo, 2015).

Dalam satuan tugas kapal selam tersebut, Komandan Satgas bertanggungjawab untuk keseluruhan proses pembangunan dengan dibantu oleh personel lainnya. Pembagian tugas secara khusus dalam satuan tugas ini terdiri dari:

1. Pengawas Platform, yang mencakup bidang permesinan, badan kapal, outfitting, painting, baterai dan pendorongan serta kelistrikan kapal selam.
2. Pengawas Sewaco, yang mencakup bidang sensor, navigasi, komunikasi, senjata dan sistem kendali senjata kapal selam.
3. Perwira Diklat yang bertugas mengatur serta mengendalikan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal selam.
4. Perwira Administrasi dan Logistik yang bertugas mengatur dan mengendalikan proses administrasi kontrak serta sistem logistik komponen-komponen kapal selam.
5. Kesekretariatan yang bertugas mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan administrasi personel dalam satuan tugas kapal selam.

Secara umum kapal selam DSME209/1400 memiliki beberapa keunggulan dari sisi teknologinya. *State of the art technology* yang dimiliki oleh kapal selam ini meliputi

Latest combat system, Enhanced operating system, Non-hull penetrating mast and Comfortable accommodation. Dan sebagai elemen terpenting dalam kapal selam, *battery* buatan Korea Selatan digunakan sebagai sumber tenaga utamanya (Jalo, 2015).

Jenis baterai kapal selam buatan Korea Selatan ini digunakan pada semua kapal selam Korea Selatan. Salah satu poin yang mengejutkan adalah mengenai Persenjataan dan Sistem kendali senjatanya. Selain dipersenjatai 8 buah tabung peluncur Torpedo untuk torpedo berukuran 533 mm *Blackshark* juga mampu untuk men-deploy ranjau laut, kapal selam ini juga memiliki desain yang mampu untuk meluncurkan rudal (Jalo, 2015).

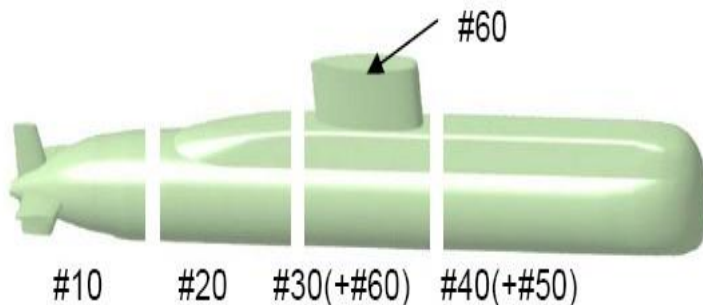
Sistem kendali senjata MSI Mk2 buatan Kongsberg dipilih oleh TNI AL sebagai komponen yang mengatur dan mengendalikan sistem peperangan serta penembakan torpedo, ditambah beberapa sensor dan peralatan elektronika yang canggih dan terkini juga ikut disematkan. Bila di kapal selam Cakra milik Indonesia sebelumnya belum memiliki *Flank Array Sonar*, maka di kapal selam baru nantinya sistem ini akan dipasang dan digunakan (Jalo, 2015).

Banyak sekali keunggulan serta kelebihan sistem dan peralatan yang digunakan dalam kapal selam baru ini dibanding kapal selam Indonesia yang sudah dimiliki sebelumnya. Radar serta ESM dari Indra-Spanyol, *Integrated Navigation System* dari SAGEM-Prancis, Optronic dan Periskop dari Cassidian-Jerman, sistem Sonar dari L3 Elac Nautic-Jerman menjadi pilihan TNI AL di dalam desain kapal selam barunya (Jalo, 2015).

Prosedur keselamatan dan keamanan kapal selam dan personel juga menjadi prioritas utama dalam perancangan desain DSME209/1400. Dua unit *Life rafts* dengan kapasitas 25 personel dengan bekal darurat selama 6 hari akan terpasang di kapal selam ini. Untuk pakaian keselamatan dan perlindungan dari dekompresi selama proses evakuasi dipilih jenis MK-X buatan Inggris sebanyak 48 buah (Jalo, 2015).

Yang paling berbeda dibanding dengan kapal selam Cakra adalah bentuk pintu baterai dibuat sesuai dengan aturan NAVSEA 0994-LP-013-9010 pada mulut pintunya. Dengan begitu bisa lakukan proses evakuasi menggunakan *Deep Submergence Rescue Vehicle (DSRV)* (Jalo, 2015).

Skema pembangunan kapal selam terbagi dalam *Local Production/Joint Production* yaitu *section #30* dan *#40* di produksi di PT. PAL, sedangkan *section #10*, *#20* dan *#50* sistem senjata dan sistem pendorong di produksi di DSME, kemudian *final assembly* sampai dengan pembuatan kapal selam di PT. PAL Indonesia. (Prasetyo, Armawi, & Salim, 2017).



Gambar 3.4
Skema Pembagian Pembangunan Kapal Selam DSME
209/1400

PT. PAL Indonesia bekerjasama dengan pihak DSME, merekrut 206 orang insinyur untuk dijadikan sebagai ahli pembuat kapal selam dan bagian produksi kapal. Manajer Humas PT. PAL Indonesia, Bayu Wicaksono, mengatakan bahwa dari 206 orang tersebut dipilih 120 sebagai perancang kapal selam dan 186 lainnya di bagian produksi. Sebanyak 20 orang di antara mereka memiliki kualifikasi sebagai desainer. Sebanyak 120 orang yang dipilih sebagai perancang kapal selam dikirim ke Korea

Selatan secara bertahap karena proses pembuatan kapal selam juga dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dimulai dengan membuat desain. Kemudian diikuti tahap *enginnering*, serta tahap berikutnya pemasangan persenjataan. Bayu menjelaskan bahwa yang melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerjasama tersebut adalah pemerintah Indonesia, yakni Kementerian Pertahanan dengan pemerintah Korea Selatan yang diwakili DSME (Jannah, 2018).

Berikut penjelasan pembagian tahapan pengerjaan kapal selam diesel listrik DSME209/1400 (Prasetyo, Armawi, & Salim, 2017).

1. Kapal selam pertama dikerjakan seluruhnya oleh ahli Korea Selatan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) di tahun 2013. Jangka waktu kapal selam ke I nomor lambung H7712 selama 52 bulan (tanggal 9 Maret 2017) dari kontrak efektif tanggal 9 November 2012.
2. Kapal selam kedua dengan nomor lambung H7713 diserahkan 59 bulan atau tanggal 9 Mei 2017, dikerjakan juga di Korea Selatan dengan melibatkan ahli Korea Selatan dan pihak Indonesia dilibatkan dalam proses pelatihan pembangunan kapal selam.
3. Untuk kapal selam ketiga dengan nomor lambung H7714 diserahkan selama 73 bulan atau tanggal 9 Desember 2018.

Pada kerjasama pembangunan kapal selam Korea Selatan dan Indonesia, pelatihan menjadi hal utama dalam perjanjian kerjasama. Hal ini mengingat sumber daya manusia di Indonesia yang belum mampu dalam pembangunan kapal selam secara mandiri. Indonesia bermaksud mengejar ketertinggalan teknologi dengan mengedepankan pelatihan terhadap sumber daya manusia

PT. PAL Indoensia (Persero) ataupun stakeholder yang terkait dalam pembangunan kapal. Saat ini, sumber daya manusia PT.PAL hanya memiliki kemampuan membangun kapal-kapal atas air yang sangat berbeda dengan teknologi pada kapal selam. Pada kontrak pengadaan kapal selam, pelatihan dituangkan dalam satu lampiran kontrak yakni Lampiran F. Dalam lampiran tersebut, diuraikan bagian-bagian yang yang dilaksanakan pelatihan dan berapa personelyang akan dilibatkan dalam pelatihan (Meidiani, 2018).

Sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 lalu, kapal selam yang sudah bisa diterima dan dioperasikan oleh pihak pemerintah Indonesia baru dua kapal dari tiga kapal yang seharusnya, sementara satu kapal yang sedianya menjadi bentuk ToT masih mengalami hambatan karena belum terpenuhinya beberapa spesifikasi sesuai yang disyaratkan oleh Korea Selatan. Pihak Korea Selatan memberikan prasyarat sebagai bentuk penjaminan mutu, sehingga di satu sisi ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi pihak Indonesia. Namun di sisi lain karena pihak Indonesia sendiri belum memenuhi prasyarat tersebut maka justru mendatangkan hambatan bagi pembangunan kapal selam ketiga (Meidiani, 2018).

E. Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan dalam bab ini, kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan yang dimulai dari pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler yang dimulai pada Mei 1966. Dilanjutkan dengan banyak kerjasama diberbagai bidang yang ditandatangani Indonesia dengan Korea Selatan. Kerjasama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan pertama kali dilakukan pada penandatanganan *Memorandum Of Understanding* pada “*Navy to Navy Talks*” antara TNI AL dan Angkatan Laut

Korea yang ditandatangani pada bulan Desember 1996 untuk pemenuhan alutsista angkatan laut. Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan pada saat ini difokuskan pada kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan akan berpusat pada pengembangan Kapal Selam kelas Changbogo dan pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Kedua proyek ini menjadi fokus utama kerjasama strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kapal selam menjadi salah satu program prioritas modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut. Selain memiliki teknologi persenjataan yang tinggi, kapal selam juga memberikan efek deterrence (daya tangkal) terhadap negara lain yang berupaya memasuki perairan nasional.

Kementerian pertahanan memilih kapal selam Chang Bogo ini, karena merasa yakin telah memegang teknologi yang akan membuat kapal selam ini menjadi sangat senyap namun mematikan. Pemerintah memilih Korea Selatan sebagai tempat pembelian kapal selam karena pertimbangan harga yang lebih murah dari negara lain. Untuk harga 3 kapal selam dari Korea Selatan sebesar USD 1 miliar, sedangkan dari negara lainnya harga per unit mencapai USD 450 juta-USD 500 juta.

Mulai tahun 2012 lalu, Indonesia dan Korea Selatan mulai merealisasikan pengembangan kapal selam sebagai proyek Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) yang dinamakan DSME209/1400 *Submarine* (Changbogo Class). Penambahan alutsista kapal selam ini diharapkan dapat menjadi wadah kekuatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam pembuatan kapal selam. Kontrak pembelian 3 unit kapal selam tersebut juga sudah mneyangkut skema *Transfer of Technology* antara PT. PAL Indonesia dengan DSME. Hal tersebut sudah selaras dengan hipotesis skripsi ini yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan untuk mencapai tujuan kemandirian pertahanan sehingga dibutuhkan transfer teknologi untuk mencapai kemandirian pertahanan tersebut. Namun dalam

pengembangan kapal selam tersebut menemui beberapa kendala dan hambatan yang akan dibahas pada bab berikutnya.